

**KAJIAN TENTANG SEKTOR PERTANIAN DAN KAITANNYA DENGAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN
(STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT)**

**STUDY IN AGRICULTURE SECTOR AND RELATED TO INCOME INEQUITY
(CASE STUDY IN WEST JAVA)**

Faqihuddin*¹, Dedi Sufyadi², dan Suyudi³

^{1,3} Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
²Program Magister Agribisnis, Pascasarjana Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*E-mail corresponding: faqihuddin@unsil.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mengkaji data time series berupa data PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sektor pertanian berkontribusi sebesar 16,92 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat. Kontribusi sektor pertanian di wilayah kabupaten sebesar 23,53 persen lebih besar daripada di wilayah kota sebesar 3,72 persen. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2013 masih tergolong tinggi, namun meski demikian sejak tahun 2012 cenderung menurun. Sektor pertanian berkontribusi untuk menurunkan ketimpangan sebesar 16,25 persen. Peneliti menyarankan agar pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat lebih fokus mengarah pada pemerataan pendapatan dengan tetap menjadikan sektor pertanian sebagai landasan pengembangan bagi sektor industri maupun jasa.

Kata kunci: Jawa Barat, Ketimpangan Pendapatan, Sektor Pertanian, Tenaga Kerja

ABSTRACT

The research aims to determine how the agricultural sector contributed to reduce income inequality in West Java province. The research method used is the case study method. Research conducted by reviewing data time series in the form of data PDRB West Java province year 2010-2013. Based on the results of the analysis, the agricultural sector contributed 16.92 percent to the gross Regional domestic product (PDRB) of West Java province. The agricultural sector contributions in the county area amounted to 23.53 percent greater than in the city area of 3.72 percent. Income inequality in the province of West Java 2010-2013 period is still relatively high, but nevertheless since the year 2012 tend to decline. The agriculture sector contributes to lowering inequality by 16.25 percent. Researchers suggest that economic development in West Java Province focus on revenue equality by still making agriculture as the cornerstone of development for the industry and services sectors.

Key words : West Java, inequity income, agriculture sector, labor.

KAJIAN TENTANG SEKTOR PERTANIAN DAN KAITANNYA DENGAN KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT)

Faqihuddin, Dedi Sufyadi, dan Suyudi

PENDAHULUAN

Data Jawa Barat Dalam Angka (2010) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Jawa Barat yang bekerja pada tahun 2009, memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa-jasa. Persentase penduduk yang bekerja pada sektor tersebut masing-masing 39,98 ; 27,84 ; 7,55 ; dan 5,83 persen. Dominasi Sektor Pertanian dalam menyerap sebagian besar tenaga kerja di provinsi Jawa Barat ini wajar karena memang potensi tanah yang subur dan iklim yang optimum untuk pembudidayaan pertanian.

Krisis ekonomi yang terjadi pada Tahun 1997 mengguncangkan perekonomian Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat. Namun, sektor pertanian terbukti masih dapat bertahan karena memiliki ketahanan terhadap guncangan struktural dari perekonomian makro. Dengan adanya keterkaitan kebelakang dan kedepan sektor pertanian, maka dengan berkembangnya sektor pertanian akan mampu mendorong berkembangnya sektor perekonomian yang lain sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berkembangnya sektor pertanian juga akan meningkatkan pendapatan petani sehingga taraf hidup petani meningkat dan pendapatan masyarakat semakin merata.

Mempertimbangkan kondisi faktual bahwa sektor pertanian masih berkontribusi terhadap perekonomian Masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dirasa perlu untuk dilaksanakan dengan mengkaji secara spesifik bagaimana peran sektor pertanian dalam perekonomian di Provinsi Jawa Barat khususnya peranan sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan tercipta formulasi kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan melainkan juga pemerataan dan stabilitasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Moehar Daniel (2003) studi kasus adalah penelitian yang sifatnya lebih terarah atau terfokus pada sifat tertentu yang tidak berlaku umum, biasanya dibatasi oleh kasus, lokasi, tempat tertentu dan waktu tertentu.

Analisis peranan sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, terdiri dari beberapa analisis yang akan dilakukan. Analisis tersebut mencakup: 1) Analisis kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Total dan penyerapan tenaga kerja;

2) Analisis ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat; dan 3) Analisis peranan sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P_{it} = \frac{S_{it}}{T_t} \times 100\%$$

Keterangan :

P_{it} : Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke- t (%)

S_{it} : PDRB sektor pertanian pada tahun ke- t (rupiah)

T_t : Total PDRB pada tahun- t (rupiah)

Sedangkan analisis penyerapan tenaga kerja oleh Sektor Pertanian ialah dengan menghitung presentase dari total angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat yang bekerja di Sektor Pertanian.

Pengukuran ketimpangan pendapatan antar Kabupaten atau Kota di Indonesia dapat dilakukan dengan metode Indeks Williamsons (CV_w) dengan rumus (Arief Daryanto dan Yundy Hafizrianda, 2010):

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Keterangan :

CV_w : Indeks ketimpangan Williamson

f_i : Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota ke- i (jiwa)

n : Penduduk total (jiwa)

\bar{Y}_i : PDRB perkapita atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota ke- i (rupiah)

\bar{Y} : PDRB perkapita atas dasar harga konstan di Provinsi Jawa Barat (rupiah)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan taraf ketimpangan adalah (Sjafrizal, 2008):

$IW \leq 0,35$: Ketimpangan taraf rendah

$0,35 < IW < 0,50$: Ketimpangan taraf sedang

$IW \geq 0,50$: Ketimpangan taraf tinggi

Peranan sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan daerah dilakukan analisis dengan cara menghitung ketimpangan pendapatan daerah tanpa memasukkan nilai PDRB sektor pertanian dalam perhitungan tersebut. Kemudian dibandingkan dengan besarnya tingkat ketimpangan dengan memasukkan PDRB sektor pertanian.

Apabila setelah PDRB sektor pertanian dikeluarkan dari perhitungan ketimpangan semakin besar, maka artinya sektor pertanian berperan dalam mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi.

Selanjutnya, untuk melihat signifikansi perbedaan antara besarnya

**KAJIAN TENTANG SEKTOR PERTANIAN DAN KAITANNYA DENGAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT)**

Faqihuddin, Dedi Sufyadi, dan Suyudi

tingkat ketimpangan dengan memasukkan PDRB sektor pertanian (CVwp) dan besarnya tingkat ketimpangan tanpa memasukkan PDRB sektor pertanian (CVwnp) dalam perhitungan, maka dilakukan uji t-berpasangan.

Hipotesisnya:

$H_0 : \mu_{CVwnp} = \mu_{CVwp}$ (tidak ada perbedaan antara CVwnp dan CVwp)

$H_1 : \mu_{CVwnp} \neq \mu_{CVwp}$ (ada perbedaan antara CVwnp dan CVwp)

Statistik uji yang digunakan diformulasikan sebagai berikut (Walpole, 1988):

$$t_{hit} = \frac{\bar{D} - d_0}{S_d/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

\bar{D} : rata-rata selisih dari $\mu_{CVwnp} - \mu_{CVwp}$

S_d : standar deviasi, dengan formula:

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

Keterangan:

d_i : Selisih $\mu_{CVwnp} - \mu_{CVwp}$ ke-i

\bar{d} : Rata-rata dari selisih

n : Banyaknya jumlah data (n -tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jawa Barat. Namun meski demikian, nilai IWP masih tetap di atas 0,50 artinya masih diperlukan instrumen kebijakan agar kontribusi sektor pertanian terhadap pemerataan pendapatan semakin meningkat.

Oleh karena itu, mengingat bahwa sektor pertanian masih berkontribusi dalam perekonomian Jawa Barat sekalipun tidak terlalu besar, tetapi bukanlah merupakan tindakan yang bijak untuk meninggalkan sektor tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya wilayah yang memiliki potensi unggul di bidang pertanian harus tetap didukung keberadaannya oleh semua pihak baik masyarakat, swasta maupun pemerintah sebagai regulator. Sektor unggulan pertanian yang ada akan sangat baik kalau diupayakan agar dapat mendukung aktivitas ekonomi sektor yang lain. Secara makro, pembangunan pertanian dikatakan berhasil atau arah pembangunan pertanian dikatakan telah berada pada jalur yang benar apabila sektor tersebut dapat menggerakkan dan berkontribusi terhadap sektor yang lain.

Sebagian ahli ekonomi memandang sektor pertanian adalah sektor penunjang yang positif dalam pembangunan ekonomi pada negara itu. Beberapa ahli telah mengemukakan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Todaro (2003) yang mengemukakan pembangunan pertanian sebagai syarat mutlak bagi pembangunan nasional bagi khususnya di negara dunia ketiga. Dia melihat sekitar dua per tiga dari bangsa yang miskin menggantungkan hidupnya dari sektor

pertanian, sebagian besar kelompok miskin tersebut bertempat tinggal di pedesaan. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi adalah: 1. Sumber utama penyediaan bahan makanan. 2. Sumber penghasilan dan pajak. 3. Sumber penghasilan devisa yang diperlukan untuk mengimpor modal, bahan baku, dan lain-lain. 4. Pasar dalam negeri untuk menampung hasil produksi industri pengolahan dan sektor bahan pertanian lainnya.

Daniel (2003) mengemukakan tiga alasan utama mengapa sektor pertanian perlu dibangun lebih dulu:

1. Barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. Umumnya pembeli barang-barang hasil industri sebagian besar berada dalam lingkungan sektor pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga memenuhi kebutuhan peralatan dan bahan untuk usaha di sektor pertanian diperlukan barang hasil industri. Oleh karena itu, masyarakat sektor pertanian harus ditingkatkan lebih dulu pendapatannya.
2. Untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah dan terjangkau, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok guru dan pegawai. Keadaan ini

bisa tercipta bila produksi hasil pertanian terutama pangan dapat ditingkatkan sehingga harganya lebih rendah dan terjangkau oleh daya beli.

3. Industri membutuhkan bahan baku yang berasal dari sektor pertanian, karena itu produksi bahan-bahan industri memberikan basis bagi pertumbuhan itu sendiri. Keadaan ini bisa tercipta sedemikian rupa sehingga merupakan suatu siklus dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Negara berkembang yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk akibat kemerosotan yang tajam angka kematian dan penurunan yang lambat dalam tingkat kesuburan akan memerlukan permintaan bahan pangan yang lebih besar lagi. Kebutuhan pangan bagi masyarakat dapat tercapai dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat memperbesar output yang dihasilkan. Meningkatkan daya beli daerah pedesaan sebagai hasil perluasan output dan produktivitas pertanian akan cenderung menaikkan permintaan atas barang manufaktur dan memperluas ukuran pasar itu sendiri.

Selanjutnya permintaan seperti pupuk, peralatan yang lebih baik, traktor dan fasilitas irigasi di sektor pertanian akan mendorong perluasan sektor

KAJIAN TENTANG SEKTOR PERTANIAN DAN KAITANNYA DENGAN KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT)

Faqihuddin, Dedi Sufyadi, dan Suyudi

industri lebih jauh lagi. Selain itu, pada saat surplus pertanian akan diangkut ke daerah perkotaan dan barang manufaktur diangkut ke daerah pedesaan, sarana pengangkutan dan perhubungan akan berkembang. Dampak jangka panjang perluasan sektor sekunder dan tersier ini akan membentuk kenaikan keuntungan di sektor-sektor tersebut, apakah sektor tersebut dikelola oleh swasta ataupun pemerintah.

Tambahan devisa juga dapat dihasilkan oleh sektor pertanian. Meningkatnya produktivitas pertanian akan memacu peningkatan volume ekspor nasional, sehingga perolehan devisa meningkat. Dengan demikian surplus pertanian mendorong pembentukan modal jika barang-barang modal tersebut diimpor dengan menggunakan devisa dari hasil pertanian. Meningkatnya penerimaan pertanian menjadi jalan terbaik bagi pembentukan modal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memobilisasi pendapatan dari sektor pertanian melalui pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak pendapatan hasil pertanian dan biaya-biaya lainnya. Terakhir, kenaikan pendapatan daerah pedesaan sebagai hasil surplus dari hasil pertanian cenderung memperbaiki kesejahteraan masyarakat daerah pedesaan, sehingga standar kehidupan sebahagian rakyat pedesaan meningkat.

Peranan sektor pertanian juga tercermin pada saat Indonesia dilanda krisis. Sektor ini terbukti mampu bertahan selama krisis dan dapat tetap menghasilkan devisa bagi Indonesia disaat sektor-sektor lain ikut terpuruk terbawa gejolak krisis moneter 1998. Depresiasi rupiah terhadap dollar yang cukup besar pada saat itu menyebabkan harga komoditi ekspor pertanian dalam rupiah pada saat itu melonjak sangat tinggi, sehingga mendorong peningkatan volume ekspor. Peningkatan volume ekspor tersebut juga karena produk-produk Indonesia dapat bersaing baik secara kompetitif maupun secara komparatif di pasar internasional (Daniel, 2003).

Menurut Soekartawi (2002), pembangunan pertanian pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi keinginan yang ingin dicapai yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian secara lebih merata. Pembangunan pertanian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas tenaga kerja, tanah dan modal. Dengan usaha tersebut maka, partisipasi aktif petani dan masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan, sehingga peningkatan tingkat produksi pertanian dapat dicapai secara efisien dan dinamis diikuti pembagian surplus ekonomi antar berbagai pelaku ekonomi secara lebih adil, serta pengembangan sistem

agribisnis yang efisien. Sektor pertanian menjadi prioritas utama karena ditinjau dari berbagai segi memang merupakan sektor yang cenderung dominan dalam ekonomi nasional. Pembangunan pertanian didorong dari segi penawaran dan dari segi fungsi produksi melalui penelitian-penelitian, pengembangan teknologi pertanian yang terus-menerus, pembangunan prasarana sosial dan ekonomi di pedesaan dan investasi-investasi oleh negara dalam jumlah besar.

Pertanian kini dianggap sebagai sektor pemimpin "*leading sector*" yang diharapkan mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya (Mubyarto, 1989). Secara konseptual maupun empiris sektor pertanian layak untuk menjadi sektor andalan ekonomi termasuk sebagai sektor andalan dalam pemerataan tingkat pendapatan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

KESIMPULAN

Simpulan

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat selama periode 2010 sampai dengan 2013 rata-rata senilai 16,92 persen, dengan kontribusi di wilayah kabupaten rata-rata 23,53 persen

sedangkan di wilayah kota hanya 3,72 persen Kontribusi Sektor Pertanian terhadap serapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat Periode tahun 2010 sampai dengan 2013 rata-rata 21,83 persen.

- 2) Ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Barat periode 2010 sampai dengan 2013 masih tergolong tinggi, namun meskipun demikian sejak tahun 2012 kecenderungannya menurun.
- 3) Sektor pertanian berperan dalam mengurangi nilai ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dalam periode 2010 sampai dengan 2013 sebesar 16,25 persen.

Saran

Dari simpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat lebih fokus mengarah pada pemerataan pendapatan dengan optimalisasi peran sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja melalui pemberian insentif bagi petani seperti subsidi dan asuransi pertanian sehingga pelaku usahatani lebih bergairah dan lebih berkembang usahanya.
- 2) Dilakukan upaya industrialisasi sektor pertanian sehingga pertanian lebih efisien/menguntungkan.
- 3) Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan

KAJIAN TENTANG SEKTOR PERTANIAN DAN KAITANNYA DENGAN KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT)

Faqihuddin, Dedi Sufyadi, dan Suyudi

sehingga produktivitas kerjanya dapat lebih meningkat

- 4) Dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan menggunakan alat analisis yang lebih tajam sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat kaitannya dengan pemerataan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akrom Hasani. 2010. *Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003 – 2008*. Semarang: Universitas Diponegoro (Url: <http://core.ac.uk/download/pdf/11718524.pdf>)
- Arief Daryanto dan Yundy Hafiz Rianda. 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor : IPB Press
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. 2010. *Jawa Barat Dalam Angka 2010*. Bandung: BPS Jawa Barat
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Pembangunan Daerah Dalam Angka 2014*. Jakarta: BPS RI
- Moehar Daniel. 2003. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3S
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Baduouse Media
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Todaro, M. P. Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid ke-1. Edisi Ke-8. Munandar dan Puji [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid ke-2. Edisi Ke-8. Munandar dan Puji [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
- Walpole, Ronald E.1988. *Pengantar Statistika*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama